

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tingginya tingkat kesadaran masyarakat terhadap performa pelayanan sektor publik menjadi dorongan organisasi publik atau pemerintah untuk menerapkan *good governance*. Masyarakat menjadi semakin cerdas dan kritis menuntut dilakukannya transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor publik. Tuntutan yang dilakukan masyarakat ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang digunakan sebagai dasar bagi serangkaian reformasi kelembagaan dalam menciptakan *good governance*, yaitu pemerintahan yang bersih, ekonomis, efektif, transparan, responsif, dan akuntabel.

Menurut Tony and Elke (2009:8), *good governance* diartikan sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan *political framework* bagi tumbuhnya aktifitas usaha. Salah satu cara untuk melihat penerapan *good governance* adalah dengan melihat kinerja instansi pemerintah secara finansial dan non finansial.

Pengukuran kinerja adalah faktor penting di dalam suatu organisasi, termasuk juga untuk organisasi sektor publik. Pengukuran kinerja sangat diperlukan untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik dan tepat sasaran. Pengukuran kinerja organisasi sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga tujuan (Mardiasmo, 2009:121). Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik. Lebih lanjut, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya

dan pembuatan keputusan. Terakhir, ukuran kinerja diperlukan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Ada beberapa alat dalam pengukuran kinerja, antara lain menggunakan metode *Balance Scorecard* dan *Value for Money*. *Balanced Scorecard* pertama kali diperkenalkan sebagai alat untuk menilai kinerja pada perusahaan komersial, sedangkan metode *Value for Money* digunakan pada sektor publik. Dalam metode *Balance Score Card* terdapat empat perspektif yang dinilai yaitu perspektif keuangan, perspektif konsumen, perspektif proses bisnis atau intern, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Sedangkan dengan metode *Value for Money* terdapat tiga elemen utama yang dinilai yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomi berarti pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Efisien berarti pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu, sedangkan efektivitas berarti tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan Ulum (2004:270). Tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan *Value for Money*, yaitu ekonomis (hemat cermat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran Mardiasmo, (2009:121).

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Sebagai salah satu aparatur lembaga di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mencakup seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah dalam rangka pembangunan daerah. Pada periode tahun 2017 sampai dengan 2018 di Kabupaten Bangkalan, terjadi 3 (tiga) kali pergantian pimpinan organisasi. Hal ini menarik peneliti untuk melakukan penelitian terkait

pengukuran kinerja Bappeda selama periode tersebut. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di bagian sebelumnya, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN BERBASIS *VALUE FOR MONEY* PADA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN PERIODE 2017-2018”**.

1.2 Kesenjangan Penelitian

Kebanyakan hasil penelitian-penelitian sebelumnya menyatakan hasil pengukuran kinerja sektor publik sangat baik, dengan tingkat persentase diatas 90%. Namun apabila diamati banyak sekali fakta-fakta atau kejadian sosial yang terjadi yang memberikan citra buruk organisasi sektor publik, serta hal ini sudah menjadi rahasia umum khususnya di Indonesia. Hal ini sangat bertentangan dan menjadikan kesenjangan penelitian.

Melalui penelitian ini, kebenaran mayoritas hasil penelitian terdahulu akan diuji. Selain itu kondisi Bappeda Kabupaten Bangkalan dalam kurun waktu 2017-2018 sangat dinamis, dikarenakan ada pergantian 3 (tiga) pimpinan organisasi. Peneliti ingin mengamati dengan lebih seksama apakah pergantian pimpinan organisasi ini berpengaruh terhadap hasil penilaian kinerja Bappeda Kabupaten Bangkalan yang mengedepankan transparansi dalam pengukuran kinerja.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan, antara lain:

1. Mengukur kinerja keuangan Bappeda Kabupaten Bangkalan dengan menggunakan *Value For Money* pada periode 2017-2018.
2. Membandingkan dan menganalisa kinerja keuangan Bappeda Kabupaten Bangkalan dengan menggunakan *Value For Money* pada periode 2017 dan 2018.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini meliputi:

Bab 1 Pendahuluan:

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah yang berupa tuntutan dari masyarakat atas *good governance* salah satunya yaitu hasil kerja instansi Bappeda Kabupaten Bangkalan pada periode 2017-2018 dimana terjadi 3 (tiga) kali pergantian kepemimpinan. Serta pembuktian teori bahwa *good governance* yang sulit diterapkan (Bovaird and Loffler, 2009).

Bab 2 Tinjauan Pustaka:

Bab ini menjelaskan mengenai definisi kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja dan pengukuran kinerja sector public. Definisi *Value For Money* (VFM), teknik pengukuran, pembahasan VFM sebagai metode penilaian kinerja, pengukuran kinerja menggunakan VFM dan langkah-langkah pengukurannya. Dalam bab ini juga terdapat penjelasan singkat mengenai penelitian sebelumnya, yaitu beberapa jurnal, skripsi dan thesis yang mengambil tema serupa.

Bab 3 Metode Penelitian:

Dalam bab ini dijelaskan mengenai jenis dan sifat penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, kemudian definisi operasional variable yaitu pemaparan definisi dari ekonomi, efisiensi, efektivitas, *input*, *output* dan *outcome*. Dijelaskan pula mengenai jenis dan sumber data yang digunakan yaitu meliputi data primer berupa hasil wawancara dengan nara sumber dan data sekunder berupa data-data internal yang diperoleh dari Bappeda Kabupaten Bangkalan, seperti APBD dan RAPBD. Selain itu juga dijelaskan mengenai teknik analisis data kuantitatif, meliputi perhitungan tingkat ekonomis, efisiensi dan efektivitas Bappeda dalam kurun waktu 2017-2018.

Bab 4 Hasil dan Pembahasan:

Dalam bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum terkait instansi Bappeda Kabupaten Bangkalan, hasil penelitian serta pembahasan dari hasil dari pengukuran dan wawancara yang dikaitkan dengan teori serta penelitian terdahulu.

Bab 5 Kesimpulan dan Saran:

Bab ini membahas mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan secara rinci serta saran untuk penelitian selanjutnya maupun bagi pembuat kebijakan ataupun bagi pihak lain yang terkait.